



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/21/2021**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHAP II TAHUN 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diajukannya 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun oleh Walikota Madiun sesuai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021 sebagaimana telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka dalam pembahasan dan pendalaman materi 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun oleh DPRD perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu segera menetapkan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Raperda Kota Madiun Tahap II Tahun 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :**
1. Surat Walikota Madiun tanggal 29 November 2021 Nomor 188/4523/401.013/2021 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 1 Desember 2021 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Madiun atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2021;
 3. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 170/3099/401.040/2021 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan 7 (tujuh) Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
 4. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 014/F.PDIP/XI/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
 5. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 007/F.Demokrat/XI/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
 6. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 011/F.Perindo/XI/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
 7. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 07/FPKB-03/XI/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda Kota Madiun Tahun 2021;

8. Surat Ketua Fraksi MANTAB DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 09/F.MANTAB/XI/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
9. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 11/F.Gerindra/XI/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
10. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 12/F.PKS-PAN/XI/2021 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda Kota Madiun Tahun 2021;
11. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 1 Desember 2021 dengan acara Penetapan Panitia Khusus DPRD Pembahasan 7 (tujuh) Raperda Kota Madiun Tahap II Tahun 2021;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 tentang:

1. Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun;
2. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2021-2041;
4. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
5. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal;
6. Tanda Daftar Gudang; dan

7. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat;

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum “KESATU” bertugas :

1. melaksanakan pembahasan, pendalaman materi, dan finalisasi pembahasan Naskah Akademik, Keterangan Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2021 dengan tenaga ahli;
2. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pembahasan dan finalisasi pembahasan terhadap Naskah Akademik, Keterangan Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2021 dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun; dan
3. melaksanakan fasilitasi atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahap II Tahun 2021 dengan Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 1 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/21/2021
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHAP II TAHUN 2021 TERHADAP:**

- 1. RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN; DAN**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.**

1. Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, S.H.
2. Wakil Ketua : drg. INDAH SAT RACHMANIATI
3. Anggota : Drs. ISTONO, M.Pd.
4. Anggota : Drs. SUYARTO, M.Pd.
5. Anggota : SUDARJONO, S.T.
6. Anggota : WINARKO, S.H.,M.Hum
7. Anggota : Y. RUDY WISNU WARDHANA, S.S.
8. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG S, S.H.,S.E.,M.M.
9. Anggota : IHSAN ABDURRAHMAN SIDDIQ
10. Anggota : SUDJARWO, S.T.
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/21/2021
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHAP II TAHUN 2021 TERHADAP:**

- 1. RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MADIUN TAHUN 2021-2041; DAN**
- 2. RAPERDA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA
MEDIK VETERINER.**

1. Ketua : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si.
2. Wakil Ketua : Drs. SUGENG, S.H.,M.H.
3. Anggota : Drs. H. ARMAYA
4. Anggota : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi, M.Pd.
5. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si, Apt, M.M.
6. Anggota : YULIANA
7. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
8. Anggota : Drs. SUTARDI
9. Anggota : RINA HARYATI, S.T. M.M.
10. Anggota : Drs. SUBYANTARA
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/21/2021
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

TAHAP II TAHUN 2021 TERHADAP:

- 1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL;**
- 2. RAPERDA TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG; DAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT.**

1. Ketua : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H.,M.Hum.
2. Wakil Ketua : DEDI TRI ARIFianto, S.E.
3. Anggota : ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.
4. Anggota : H. AGUS WIYONO, S.H.
5. Anggota : HARI SANTOSO, S.T.
6. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
7. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
8. Anggota : SLAMET HARIYADI
9. Anggota : ISMIATI, S.H.,S.Pd.
10. Anggota : H. NUR SALIM, S.Pd.I
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.